

# Kimha Tahanan Kota

## Kasus Dugaan Korupsi Baju Hansip

PONTIANAK--Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menetapkan Cornelius Kimha sebagai tahanan kota dalam kasus dugaan korupsi pengadaan baju hansip. Sedangkan tersangka lain Ketua Panitia Lelang Rukasi, Kontraktor Pelaksana Donal Ginanjar dan pemegang aggaran Toni Ferdi, sebelumnya telah dijebloskan dalam rumah tahanan.

Kajati Kalbar Faedhoni Yusuf mengatakan status tahanan kota pada Kimha sesuai aturan yuridis formal. Tidak menahan Kimha di Rutan berdasar pertimbangan kesehatan. Yakni lampiran rekam medik dari



**Cornelius Kimha**

dokter sejak lima hingga enam tahun lalu hingga rekam medik terbaru.

"Rekaman itu menunjukkan Kimha memiliki latar belakang gangguan kesehatan. Sehingga penahanan di Rutan dapat diabaikan," kata Faedhoni Yusuf dalam diskusi bertajuk Bicara Kejaksaan (Bijak)

◆ **Ke Halaman 7 Kolom 5**

# Kimha Tahanan Kota

*Sambungan dari halaman 1*

di TVRI Pontianak, Senin (15/11) petang.

Kajati menambahkan, dalam waktu secepatnya kasus pengadaan baju hansip ini akan disidangkan untuk mencari kepastian hukum. Ia menargetkan akhir November, kasus pengadaan baju hansip telah masuk pengadilan.

Menurut Kajati, tidak hanya kasus pengadaan baju hansip yang menjadi prioritas penyelesaian. Melainkan sejumlah kasus yang dalam tahap penyidikan segera dituntaskan. Dia merincikan sekitar dua belas tersangka kasus dugaan korupsi yang menjalani penahanan akan segera diproses ke pengadilan.

Pengajar Fakultas Hukum Untan, Hermansyah, salah satu pembicara mengatakan progress kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi telah mulai tampak. Karena itu perlu mendapat dukungungan penegakan

supremasi hukum di Kalbar.

Namun ia menginginkan kejaksaan dapat menjelaskan ke publik soal status penahanan kota pada Kimha, agar tidak menimbulkan prasangka masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Meski secara aturan langkah kejaksaan dia nilai tepat dan sesuai hukum. Yakni menetapkan tahanan kota bagi salah seorang tersangka kasus pengadaan baju hansip, dengan pertimbangan kesehatan, sesuai keterangan dokter.

"Penjelasan penting untuk menepis dugaan diskriminasi hukum. Sebagai pencerahan ke publik," kata Hermansyah. Meskipun sebenarnya tidak ada diskriminasi.

Hal senada diungkapkan Hermawansyah dari Gemawan, salah satu pembicara. Ia menganggap penjelasan ke publik sangat penting bagi kejaksaan. Agar tidak menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat. Tetapi ia memberikan apresiasi

terhadap kinerja kejaksaan yang mulai tampak dalam penindakan kasus dugaan korupsi. "Progres penegakan hukum akan membawa banyak perubahan," katanya.

"Peran institusi dalam pemberantasan korupsi sangat penting," tambah dia.

Pengadaan baju hansip untuk kepentingan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pilpres 8 Juli 2009 ini diketahui bermasalah setelah diaudit BPK Perwakilan Kalbar. Audit yang dilakukan tahun 2009 itu tidak bersifat global, tetapi audit khusus berbentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Pengadaan pakaian Hansip dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama Desember 2008 dengan pagu anggaran Rp4,5 miliar untuk pengadaan sekitar 8 ribu stel. Tahap kedua Februari hingga Maret 2009 dengan pagu dana sekitar Rp4,8 Miliar untuk pengadaan 7.950 stel pakaian. (stm)